

EVALUASI KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

**Arni Karina
Dephy Noerainy**

ABSTRAK

Persoalan keuangan daerah merupakan salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah dilaksanakan.

Untuk menganalisis kinerja keuangan daerah Pemprov DKI Jakarta, metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Adapun data yang digunakan pada penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemprov DKI Jakarta di mana sampel yang diambil adalah tahun anggaran 2008 – 2012.

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemprov DKI Jakarta sudah baik, untuk rasio kemandirian rata – ratanya adalah 55,338% termasuk dalam pola hubungan partisipatif, untuk rasio efektifitas rata – ratanya adalah 104,915% termasuk dalam kriteria sangat efektif, rasio efisiensi rata – ratanya adalah 92,10% termasuk dalam kriteria kurang efisien, rata – rata rasio aktivitas 75,85% untuk belanja operasi sedangkan untuk belanja modal sebesar 24,14% berarti Pemprov DKI Jakarta lebih mementingkan belanja operasi daripada belanja modal, adapun rasio pertumbuhan dari tahun anggaran 2008 – 2012 mengalami kenaikan yang beragam. Hambatan kinerja keuangan Pemprov DKI yaitu: praktik penyimpangan anggaran pada Pemprov DKI Jakarta, lemahnya kontrol *budgeting* DPRD DKI Jakarta, dan kuatnya pengaruh politik. Cara Pemerintah dalam mengatasi hambatan yang terdapat dalam kinerja keuangan daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2008 – 2012 yaitu dengan : gerakan pengawasan anggaran daerah DKI Jakarta, memperkuat dan memaksimalkan fungsi *budgeting* DPRD DKI Jakarta, serta perbaikan dan penataan kembali manajemen pengelolaan keuangan daerah DKI Jakarta.

Kata Kunci : Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas, dan Rasio Pertumbuhan.

PENDAHULUAN

Persoalan keuangan daerah merupakan salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah, meskipun diakui bahwa berbagai variabel lain juga mempengaruhi kemampuan keuangan daerah. Pentingnya variabel keuangan daerah berkaitan dengan kenyataan bahwa mobilisasi terhadap sumber – sumber daya keuangan daerah dipandang sebagai bagian yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya Undang – Undang No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dan Undang – Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kewenangan dimaksud diantaranya adalah keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan, dan target penggunaan anggaran.

Selain itu, pengelolaan keuangan daerah telah diatur dalam Permendagri No.21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Regulasi aturan – aturan tersebut dirasakan sangat menyulitkan dalam hal pelaksanaannya karena disamping butuh waktu untuk mempelajari sekaligus memahami, kendala berikutnya adalah adanya aturan-aturan pelaksanaan yang belum dikeluarkan, baik itu turunan dari undang-undang maupun peraturan –peraturan.

Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangannya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan tugas pembangunan.

Pada umumnya APBD suatu daerah didominasi oleh sumbangan Pemerintah Pusat dan sumbangan lain-lain, yang diatur dengan peraturan perundang-undangan, yaitu sekitar 75% dari total penerimaan daerah. Hal ini menyebabkan daerah masih tergantung kepada Pemerintah Pusat sehingga kemampuan daerah untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki menjadi terbatas. Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah bukanlah disebabkan oleh karena secara struktural daerah memang miskin atau tidak memiliki sumber-sumber keuangan yang potensial, tetapi lebih banyak disebabkan oleh kebijakan Pemerintah Pusat.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dengan penjelasan atas hasil laporan keuangannya untuk tahun anggaran 2012 yang telah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK menemukan 65 temuan yang berpotensi merugikan keuangan daerah senilai Rp 154,55 miliar dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI yang mencapai Rp 41 triliun. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dianggap belum menerapkan kebijakan penyisihan piutang dan penyusunan aset tetap, serta potensi konsekuensi putusan Mahkamah Agung atas sengketa dengan pihak swasta. (www.nasional.kompas.com).

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan oleh Pemerintah Daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan

untuk menunjukkan pertanggungjawaban (*accountability*) Pemerintah Daerah atas sumber yang dipercayakan. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah dilaksanakan.

Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan Pasal 232 Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.
- b. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- c. Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan arus kas terdiri atas arus kas masuk dan arus kas keluar dengan klasifikasi berdasarkan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non – anggaran.
- d. Catatan Atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terperinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, serta ungkapan – ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Analisis Rasio Laporan Keuangan

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu, dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu Pemerintah Daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensial daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan Pemerintah Daerah tersebut terhadap Pemerintah Daerah lainnya.

Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain: rasio kemandirian daerah, rasio efektifitas dan efisiensi, rasio aktivitas, serta rasio pertumbuhan. (Abdul Halim, 2012, L-5)

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. (Abdul Halim, 2012, L5).

2. Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

a. Rasio Efektifitas

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah. (Abdul Halim, 2012, L6).

b. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintahan daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintahan semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. (Abdul Halim, 2012, L7)

3. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja operasi maupun belanja modal terhadap belanja daerah yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan.

4. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*Growth Ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi – potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian. (Abdul Halim, 2012, L12).

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2008 – 2012.

Jenis Data

Data sekunder ini terdiri atas : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2008 – 2012 serta data pendukung lainnya yang bersumber dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Definisi Operasional

Untuk memberikan suatu pemahaman agar memudahkan penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa batasan penelitian dan fokus penelitian ini yang dioperasionalkan melalui beberapa indikator sebagai berikut:

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rumus Rasio Kemandirian (Abdul Halim, 2012, L5) :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Pola Hubungan, Tingkat Kemandirian, dan Kemampuan Daerah

Kemampuan Daerah	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	25 – 50	Konsultif
Sedang	50 – 75	Partisipatif
Tinggi	75 – 100	Delegatif

Sumber : A.A.N.B. Dwirandra (Abdul Halim, 2004, 189)

Paul Hersey dan Ken Blanchard dalam Abdul halim (2004 : 189) mengemukakan mengenai pola hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah terutama tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah antara lain :

- Pola hubungan instruktif, dimana peranan Pemerintah Pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Daerah yang berarti bahwa daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah.
- Pola hubungan konsultif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang karena dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.

- c. Pola hubungan partisipatif, peranan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- d. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar – benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.

Rasio Efektifitas

Rumus rasio efektifitas (Abdul Halim, 2012, L6) :

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang Ditetapkan}} \times 100 \%$$

Kriteria Penilaian Efektifitas Keuangan Daerah

Efektifitas Keuangan Daerah	Kriteria
Di atas 100%	Sangat efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup efektif
60% - 80%	Kurang efektif
Di bawah 60 %	Tidak efektif

Sumber : Mahsun Moh (2006 : 187)

Rasio Efisiensi

Rumus rasio efisiensi (Abdul Halim, 2012, L7) :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Kriteria Penilaian Efisiensi Keuangan Daerah

Efisiensi Keuangan Daerah	Kriteria
Di atas 100%	Tidak efisien
90% – 100%	Kurang efisien
80% – 90%	Cukup efisien
60% – 80%	Efisien
Di bawah 60%	Sangat efisien

Sumber : Mahsun Moh (2006 : 187)

Rasio Aktivitas

Rumus rasio aktivitas (Abdul Halim, 2012, L8) :

$$\text{Rasio Belanja Operasi terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Pertumbuhan

Rumus Rasio Pertumbuhan (Abdul Halim, 2012, L12) :

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD } x_n - x_{n-1}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD } x_{n-1}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi Pertumbuhan } \sum \text{Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pertumbuhan } \sum \text{Pendapatan } x_n - x_{n-1}}{\text{Realisasi Pertumbuhan } \sum \text{Pendapatan } x_{n-1}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Pertumbuhan Belanja Operasi } x_n - x_{n-1}}{\text{Realisasi Pertumbuhan Belanja Operasi } x_{n-1}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Pertumbuhan Belanja Modal } x_n - x_{n-1}}{\text{Realisasi Pertumbuhan Belanja Modal } x_{n-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

x_n = Tahun yang dihitung.

x_{n-1} = Tahun sebelumnya.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Metode ini menerapkan konsep perhitungan rasio keuangan, yaitu dengan menghitung rasio keuangan dari pos – pos Rencana Anggaran dan Realisasi Anggaran yang tertuang dalam APBD dan Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun anggaran 2008 – 2012. Metode ini dilakukan dengan memperhatikan indikator kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengelola keuangan daerahnya dengan menggunakan rasio – rasio.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah

a. Analisis Perhitungan Rasio Kemandirian

Berikut adalah perhitungan rasio kemandirian yang bersumber datanya bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran 2008 – 2012.

$$\text{Tahun 2008} = \frac{10.455.565.540.756,03}{19.221.757.880.603,03} \times 100\% = 54,39\%$$

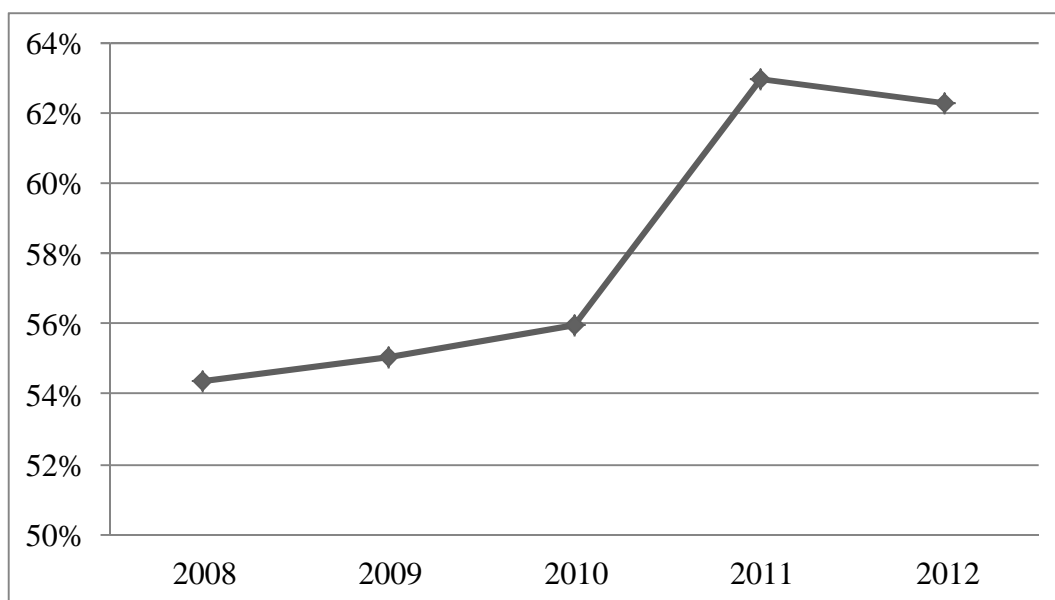
$$\text{Tahun 2009} = \frac{10.601.057.958.783,20}{19.262.681.588.555,30} \times 100\% = 55,03\%$$

$$\text{Tahun 2010} = \frac{12.891.992.182.042,05}{23.025.986.993.128,05} \times 100\% = 55,98\%$$

$$\text{Tahun 2011} = \frac{17.825.987.294.430,82}{28.297.361.482.869,82} \times 100\% = 62,99\%$$

$$\text{Tahun 2012} = \frac{22.040.801.447.924,03}{35.379.180.051.989,00} \times 100\% = 62,30\%$$

Gambar Rasio Kemandirian



Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2008 – 2012 adalah sebesar 54,39%, 55,03%, 55,98%, 62,99%, dan 62,30%. Provinsi DKI Jakarta

dengan rasio kemandirian daerah rata – rata dalam 5 tahun terakhir yaitu tahun 2008 – 2012 yang mencapai 58,338% menginterpretasikan pola kemandirian yang sudah partisipatif dengan tingkat kemampuan daerah adalah sedang. Menurut Paul Hersey dan Ken Blanchard dalam Abdul Halim (2004:189) pola partisipatif adalah dalam melaksanakan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, peranan Pemerintah Pusat mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah. Penerapan kebijakan otonomi daerah tidak serta merta menjadikan DKI Jakarta mandiri dan mampu membiayai segala aktifitas pembangunan DKI Jakarta melalui optimalisasi perolehan sumber – sumber pendapatan daerah. Faktanya, bahwa kemandirian DKI Jakarta akan sangat bergantung dari besarnya potensi sumber – sumber pendapatan DKI Jakarta untuk membiayai belanja daerahnya. Aspek penting lainnya yang juga tidak dapat dikesampingkan adalah adanya dukungan kualitas sumber daya manusia yang memadai sebagai penggerak roda pembangunan. .

b. Trend Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dilihat Dari Rasio Kemandirian

Trend rasio kemandirian DKI Jakarta secara berturut – turut dari tahun 2008 – 2012 adalah sebesar 0,64%, 0,95%, 7,01%, serta -0,69%. Dari tahun 2008 sampai tahun 2011 kenaikan rasio kemandirian mengalami peningkatan yang disebabkan oleh kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tingginya kontribusi Pendapatan Asli Daerah tersebut disebabkan tingginya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, serta kuatnya pengelolaan yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap kekayaan daerah yang dipisahkan sehingga dapat menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang maksimal. Di tahun 2012 rasio kemandirian mengalami penurunan sebesar 0,69% yang disebabkan oleh penurunan dari Lain – Lain Pendapatan yang Sah di tahun tersebut, namun secara keseluruhan rasio kemandirian DKI Jakarta tahun anggaran 2008 – 2012 dapat dikatakan cukup baik.

2. Analisis Tingkat Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

a. Perhitungan rasio efektifitas PAD Penprov DKI Jakarta

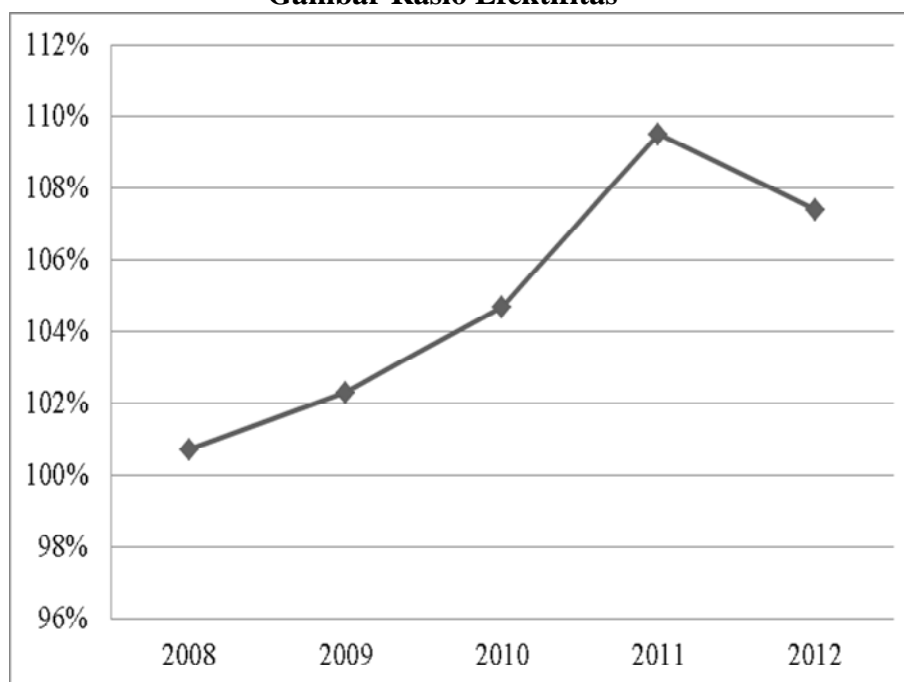
**Perhitungan Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran
2008 – 2012**

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Target Pendapatan Asli Daerah	Rasio Efektifitas
2008	10.455.565.540.756,03	10.381.542.819.362,00	100,713%
2009	10.601.057.958.783,30	10.363.435.508.395,00	102,292%
2010	12.891.992.182.041,05	12.315.398.272.250,00	104,681%
2011	17.825.987.294.430,82	16.280.133.657.370,00	109,495%
2012	22.040.801.447.924,03	20.523.433.370.351,00	107,393%
Rata – Rata Rasio Efektifitas Tahun 2008 – 2012			104,915%

Sumber: APBD dan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, data diolah

	$\frac{10.455.565.540.756,03}{10.381.542.819.362,00} \times 100\% = 100,713\%$	
Tahun 2008 =	$\frac{10.601.057.958.783,30}{10.363.435.508.395,00} \times 100\% = 102,292\%$	
Tahun 2009 =	$\frac{12.891.992.182.041,05}{12.315.398.272.250,00} \times 100\% = 104,681\%$	
Tahun 2010 =	$\frac{17.825.987.294.430,82}{16.280.133.657.370,00} \times 100\% = 109,495\%$	
Tahun 2011 =	$\frac{22.040.801.447.924,04}{20.523.433.370.351,00} \times 100\% = 107,393\%$	
Tahun 2012 =		

Gambar Rasio Efektifitas



Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel diatas, kita dapat mengetahui bahwa rasio efektifitas Pendapatan Asli Daerah tahun 2008 – 2012 secara berturut – turut yaitu sebesar 100,713%, 102,292%, 104,681%, 109,495%, dan 107,393%. Berdasarkan Kriteria Penilaian Efektifitas Keuangan Daerah, kinerja keuangan daerah DKI Jakarta pada umumnya memiliki tingkat efektifitas keuangan daerah melewati 100% yang berarti menyatakan kinerja keuangan DKI Jakarta termasuk kedalam

kategori sangat efektif yang menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta efektif dalam merealisasikan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dalam melakukan pemungutan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

b. Trend Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dilihat Dari Rasio Efektifitas PAD.

Trend rasio efektifitas secara berturut – turut dari tahun 2008 – 2012 adalah sebesar 1,579%, 2,389%, 4,814%, serta -2,102%. Kenaikan tingkat efektifitas yang terjadi pada tahun 2008 – 2011 sangat baik walaupun di tahun 2008 terjadi penurunan tingkat efektifitas sebesar -2,102%. Walau demikian, dapat kita cermati bahwa bahwa tingkat efektifitas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melampaui 100%. Ini berarti bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangatlah efektif dalam hal pemungutan Pendapatan Asli daerah. Kecenderungan peningkatan tingkat efektifitas yang terjadi di tahun 2008 – 2011 memberi isyarat bahwa pencapaian ini perlu diperhatikan dan dipertahankan meskipun di tahun 2012 tingkat efektifitas mengalami penurunan. Ini merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk dapat ditingkatkan lagi tingkat efektifitasnya di tahun – tahun selanjutnya.

3. Analisis Tingkat Efisiensi Keuangan Daerah

a. Analisis Perhitungan Rasio Efisiensi

Rumus rasio efisiensi (Abdul Halim, 2012, L7) :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Kriteria Penilaian Efisiensi Keuangan Daerah

Efisiensi Keuangan Daerah	Kriteria
Di atas 100%	Tidak efisien
90% – 100%	Kurang efisien
80% – 90%	Cukup efisien
60% – 80%	Efisien
Di bawah 60%	Sangat efisien

Sumber : Mahsun Moh (2006 : 187)

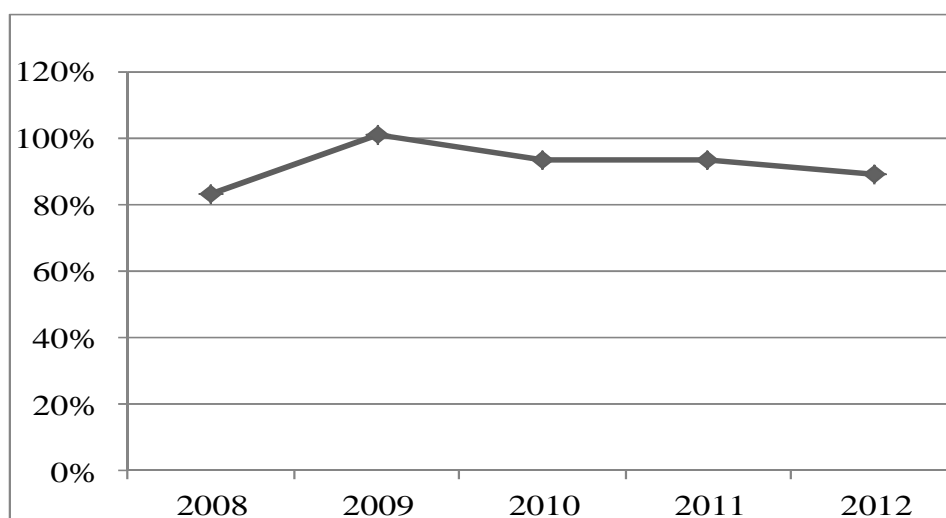
$$\text{Tahun 2008} = \frac{15.956.526.086.574,00}{19.221.757.880.603,03} \times 100\% = 83,01\%$$

$$\text{Tahun 2009} = \frac{19.511.099.430.822,10}{19.262.681.588.555,30} \times 100\% = 101,29\%$$

$$\text{Tahun 2010} = \frac{21.552.895.838.935,00}{23.025.986.993.128,05} \times 100\% = 93,60\%$$

$$\text{Tahun 2011} = \frac{26.423.599.893.297,00}{28.297.361.482.869,82} \times 100\% = 93,38\%$$

$$\text{Tahun 2012} = \frac{31.558.706.898.925,00}{35.379.180.051.989,03} \times 100\% = 89,20\%$$



Sumber : Data Diolah

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa rasio efisiensi belanja daerah terhadap pendapatan daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2008 – 2012 adalah 83,01%, 101,29%, 93,60%, 93,38%, dan 89,20%. Sesuai dengan kriteria penilaian efisiensi keuangan daerah, pada tahun 2008 dan 2012 kinerja keuangan DKI Jakarta berada pada interval 80% - 90% yang berarti menunjukkan kinerja yang cukup efisien. Pada tahun 2009 kinerja keuangan DKI Jakarta tidak efisien karena berada pada interval $\geq 100\%$. Untuk tahun 2010 dan 2011 menunjukkan kinerja yang kurang efisien karena berada pada interval 90% - 100%. Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan pemungutan

pendapatan dikategorikan kurang efisien yang mana dengan mengeluarkan biaya yang relatif banyak, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menghasilkan *output* yang jumlahnya lebih besar sedikit dari biaya yang telah dikeluarkan sebelumnya atau bahkan ada yang berjumlah di bawah biaya yang telah dikeluarkan sebelumnya dan memberikan penggambaran kinerja pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang kurang baik.

b. Trend Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dilihat Dari Rasio Efisiensi

Trend rasio efisiensi secara berturut – turut dari tahun 2008 -2012 adalah sebesar 18,28%, -7,69%, -0,22%, dan -4,18%. Tingkat rasio efisiensi mengalami fluktuasi. Dari tahun anggaran 2008 – 2012, hanya tahun 2008 dan 2012 yang cukup efisien dibanding dengan tahun yang lainnya. Secara keseluruhan tingkat efisiensi sangat tidak baik bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena semakin tinggi kenaikan pada rasio efisiensi maka semakin mendekati ketidakefisienan dan begitupun sebaliknya.

4. Analisis Aktivitas

Rumus rasio aktivitas (Abdul Halim, 2012, L8) :

$$\text{Rasio Belanja Operasi terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah perhitungan rasio aktivitas yang datanya bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun anggaran 2008 – 2012

Rasio Aktivitas Belanja Operasi :

$$\text{Tahun 2008} = \frac{13.371.844.499.614,00}{15.956.526.086.574,00} \times 100\% = 83,80\%$$

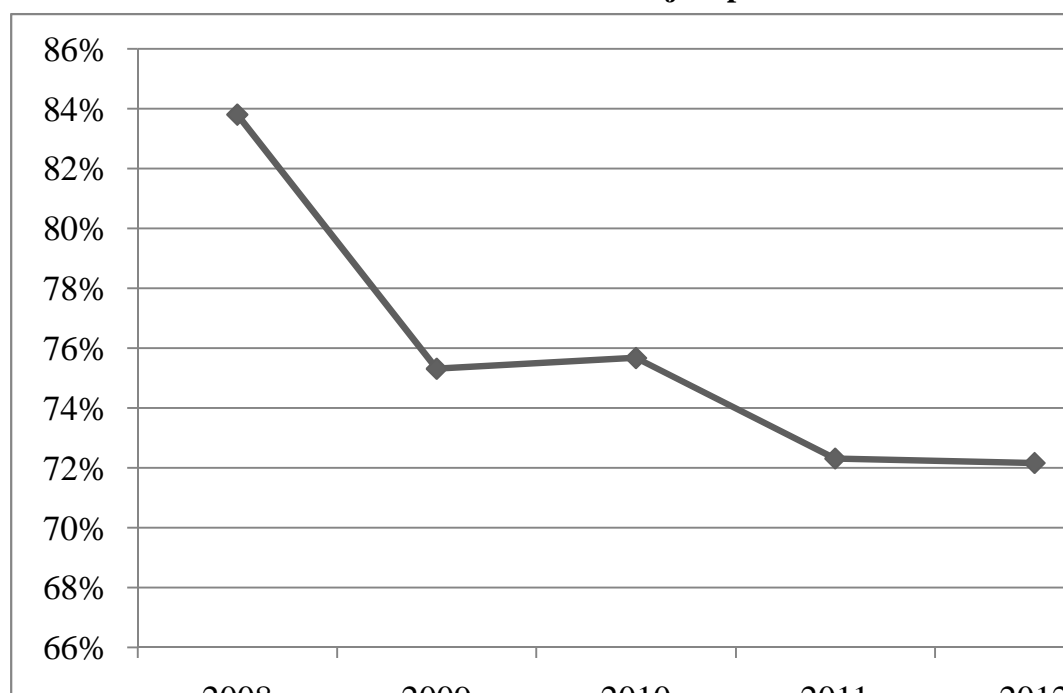
$$\text{Tahun 2009} = \frac{14.694.496.595.930,10}{19.511.099.430.822,10} \times 100\% = 75,31\%$$

$$\text{Tahun 2010} = \frac{16.309.749.142.137,00}{21.552.895.838.935,00} \times 100\% = 75,67\%$$

$$\text{Tahun 2011} = \frac{19.107.266.558.546,00}{26.423.599.893.297,00} \times 100\% = 72,31\%$$

$$\text{Tahun 2012} = \frac{22.771.853.465.799,00}{31.558.706.898.925,00} \times 100\% = 72,16\%$$

Gambar Rasio Aktivitas Belanja Operasi

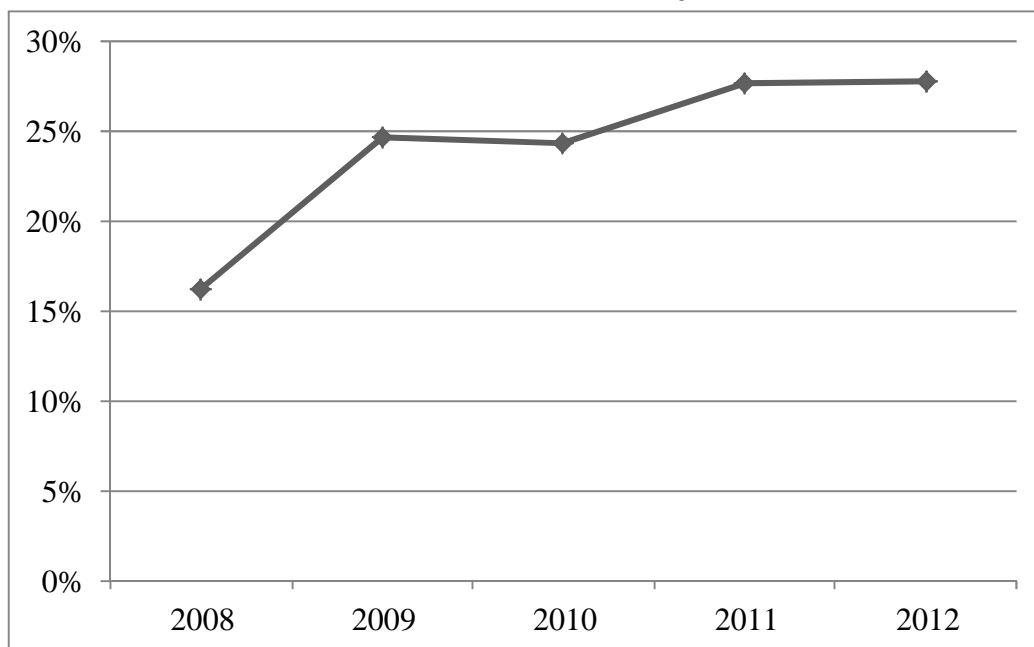


Sumber : Data Diolah

Rasio Aktivitas Belanja Modal :

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2008} &= \frac{2.581.600.192.153,00}{15.956.526.086.574,00} \times 100\% = 16,18\% \\ \text{Tahun 2009} &= \frac{4.816.602.834.892,00}{19.511.099.430.822,10} \times 100\% = 24,69\% \\ \text{Tahun 2010} &= \frac{5.243.146.696.798,00}{21.552.895.838.935,00} \times 100\% = 24,33\% \\ \text{Tahun 2011} &= \frac{7.316.333.334.751,00}{26.423.599.893.297,00} \times 100\% = 27,69\% \\ \text{Tahun 2012} &= \frac{8.784.365.760.425,00}{31.558.706.898.925,00} \times 100\% = 27,83\% \end{aligned}$$

Gambar Rasio Aktivitas Belanja Modal



Sumber : Data Diolah

Dari hasil perhitungan rasio aktivitas di atas dapat terlihat bahwa sebagian besar dana dialokasikan untuk belanja operasi sehingga rasio belanja modal terhadap APBD masih sangat rendah. Rasio aktivitas pada tahun 2008 untuk belanja operasi sebesar 83,80% dan belanja modal sebesar 16,18%. Di tahun 2009 belanja operasi sebesar 75,31% dan belanja modal sebesar 24,69%. Pada tahun 2010 belanja operasi sebesar 75,67% dan belanja modal sebesar 24,33%. Di tahun 2011 belanja operasi sebesar 72,31% dan belanja modal sebesar 17,69%. Untuk tahun 2012 belanja operasi sebesar 72,16% dan belanja modal sebesar 27,83%.

Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan rasio aktivitas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memprioritaskan pada belanja operasi daripada belanja modal. Belanja pegawai perlu dihemat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna dialokasikan untuk belanja modal dan kepentingan masyarakat DKI Jakarta. Karena berkaitan dengan sarana dan prasarana masyarakat DKI Jakarta.

5. Analisis Pertumbuhan

Rumus Rasio Pertumbuhan (Abdul Halim, 2012, L12) :

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD } x_n - x_{n-1}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD } x_{n-1}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi Pertumbuhan } \sum \text{Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pertumbuhan } \sum \text{Pendapatan } x_n - x_{n-1}}{\text{Realisasi Pertumbuhan}} \times 100\%$$

$$\sum \text{Pendapatan } x_{n-1}$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Pertumbuhan Belanja Operasi } x_n - x_{n-1}}{\text{Realisasi Pertumbuhan Belanja Operasi } x_{n-1}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Pertumbuhan Belanja Modal } x_n - x_{n-1}}{\text{Realisasi Pertumbuhan Belanja Modal } x_{n-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

x_n = Tahun yang dihitung.

x_{n-1} = Tahun sebelumnya.

1) Perhitungan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah :

$$\text{a) } \frac{10.601.057.958.783,30 - 10.455.565.540.756,03}{10.455.565.540.756,03} = 1,39\%$$

$$\text{b) } \frac{12.891.992.182.041,05 - 10.601.057.958.73,30}{10.601.057.958.783,30} = 21,61\%$$

$$\text{c) } \frac{17.825.987.294.430,82 - 12.891.992.182.041,05}{12.891.992.182.041,05} = 38,27\%$$

$$\text{d) } \frac{22.040.801.447.924,03 - 17.825.987.294.430,82}{17.825.987.294.430,82} = 23,64\%$$

2) Perhitungan Pertumbuhan Pendapatan :

$$\text{a) } \frac{19.262.681.588.555,30 - 19.221.757.880.603,30}{19.221.757.880.603,30} = 0,21\%$$

$$\text{b) } \frac{23.025.986.993.128,05 - 19.262.681.588.555,30}{19.262.681.588.555,30} = 19,54\%$$

$$\text{c) } \frac{28.297.361.482.869,82 - 23.025.986.993.128,05}{23.025.986.993.128,05} = 22,89\%$$

$$\text{d) } \frac{35.379.180.051.989,03 - 28.297.361.482.869,82}{28.297.361.482.869,82} = 25,03\%$$

3) Perhitungan Pertumbuhan Belanja Operasi :

$$\frac{14.694.496.595.930,10 - 13.371.844.499.614,00}{13.371.844.499.614,00} = 9,89\%$$

$$\frac{16.309.749.142.137,00 - 14.694.496.595.930,10}{14.694.496.595.930,10} = 10,99\%$$

$$\frac{19.107.266.558.546,00 - 16.309.749.142.137,00}{16.309.749.142.137,00} = 17,15\%$$

$$\frac{22.771.853.465.799,00 - 19.107.266.558.546,00}{19.107.266.558.546,00} = 19,18\%$$

4) Perhitungan Pertumbuhan Belanja Modal :

$$\frac{4.816.602.834.892,00 - 2.581.600.192.153,00}{2.581.600.192.153,00} = 86,57\%$$

$$\frac{5.243.146.696.798,00 - 4.816.602.834.892,00}{4.816.602.834.892,00} = 8,85\%$$

$$\frac{7.316.333.334.751,00 - 5.243.146.696.798,00}{5.243.146.696.798,00} = 39,54\%$$

$$\frac{8.784.365.760.426,00 - 7.316.333.334.751,00}{7.316.333.334.751,00} = 20,06\%$$

Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan APBD DKI Jakarta pada tahun anggaran 2008 – 2012 menunjukkan pertumbuhan positif. Terutama pertumbuhan pendapatan, ada kecenderungan Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta mengalami kenaikan yang terutama disebabkan pada sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tetapi tahun anggaran 2009 dan 2011 Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan pada sektor pajak daerah.

Pendapatan Asli Daerah juga mengalami pertumbuhan yang signifikan pada tahun 2010 – 2011 sebesar 38,27% dan pada tahun 2008 – 2009 merupakan pertumbuhan yang paling rendah sebesar 1,39%. Secara keseluruhan dari tahun ke tahun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mampu meningkatkan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerahnya.

Seluruh pendapatan mampu dipertahankan dengan baik. Kenaikan pendapatan yang signifikan terjadi pada tahun 2011 – 2012 sebesar 25,03% dan kenaikan pendapatan yang terendah terjadi pada tahun 2008 – 2009 sebesar 0,21%. Dilihat dari segi pendapatan secara keseluruhan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mampu mempertahankan pendapatannya dari tahun ke tahun.

Dalam belanja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari belanja operasi dan belanja modal juga mengalami pertumbuhan. Belanja operasi pada tahun 2011 – 2012 mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, yaitu sebesar 19,18%, sedangkan untuk belanja modal pertumbuhan yang tertinggi terjadi pada tahun 2008 – 2009 sebesar 86,57%.

Dari analisis rasio pertumbuhan diatas dapat diketahui bahwa kinerja pengelolaan keuangan DKI Jakarta baik, karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mampu meningkatkan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Begitu pula dengan pertumbuhan belanja operasi yang sejalan dengan pertumbuhan yang terjadi pada Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan. Pada belanja modal yang terjadi pada tahun 2008 – 2009 merupakan kenaikan yang paling tertinggi dalam pertumbuhan dalam rasio, yaitu sebesar 86,57% yang pada akhirnya di tahun – tahun selanjutnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mampu mempertahankan kenaikan rasio yang tertinggi tersebut walaupun dalam dalam Laporan Realisasi Anggaran 2009 – 2012 mengalami peningkatan pada tiap tahunnya.

Hambatan Dalam Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2008 – 2012

Hambatan – hambatan yang terjadi dalam kinerja keuangan daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2008 – 2012, di antaranya adalah :

a. Praktik Penyimpangan Anggaran DKI Jakarta

Maraknya praktik penyimpangan anggaran, bahkan sudah mengarah pada praktik korupsi terutama pada anggaran – anggaran pembangunan di DKI Jakarta. Praktik ini kemudian menjadikan anggaran pembangunan kurang dinikmati secara nyata oleh masyarakat dan akibatnya kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta semakin menurun.

Realitas perubahan sistem pengelolaan keuangan DKI Jakarta sampai saat ini masih melalui jalan panjang yang berliku. Dominasi politik daging sapi di lembaga legislatif, masih kentalnya praktik *institutional corruption* di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta minimnya partisipasi masyarakat, membuat jalan semakin berkelok. Secara substansi, belum ada perubahan yang signifikan, sehingga masih cenderung menjadi obsesi. Ini yang kemudian menjadi berbagai macam penyimpangan anggaran di DKI Jakarta yang berujung pada praktik korupsi.

b. Lemahnya Kontrol *Budgeting* DPRD DKI Jakarta

Dalam beberapa hasil penelitian yang dilakukan kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli terhadap politik anggaran daerah DKI Jakarta, menunjukkan bahwa eksekutif lebih berkuasa atas pemenuhan anggaran. Karena dinas – dinas yang berada di bawah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih banyak mengajukan *draft – draft* usulan anggaran, program pembangunan, sekaligus biaya rutin mereka. Sebagai pekerjaan tahunan, proses evaluasi dan pengawasan juga sebenarnya lebih banyak dimainkan oleh anggota DPRD DKI Jakarta.

Sehingga naik turunnya angka – angka anggaran juga lebih banyak disusun dari rumusan dinas pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri. Namun, jangan lupa bahwa ada politik *bargaining* anggaran antara eksekutif dan legislatif, yang celakanya tawar – menawar tersebut bukan didasarkan pada kebutuhan dasar rakyat, melainkan pada masing individu pemain – pemain politik di lembaga eksekutif maupun DPRD DKI Jakarta.

- c. Kuatnya Pengaruh Politik di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- Mengingat kebijakan anggaran merupakan bagian dari politik, maka realisasi anggaran berkaitan erat dengan kepentingan politik. Kepentingan politik menentukan realisasi anggaran. Banyak program – program besar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak dapat direalisasikan karena dihambat oleh kepentingan politik *stakeholder*. Kepala daerah dan DPRD DKI Jakarta adalah dua *stakeholder* yang berkepentingan langsung dengan kebijakan anggaran. Seringkali kepala daerah dan DPRD DKI Jakarta tidak harmonis dalam pengelolaan anggaran. Mereka mengedepankan kepentingan masing – masing. Kepala daerah membawa visi yang berbeda dengan DPRD DKI Jakarta. Kebijakan anggaran dikelola berdasarkan kepentingan, bukan kinerja dan kebutuhan penting untuk pembangunan daerah. Perbedaan kepentingan dan visi akhirnya memperburuk pengelolaan keuangan daerah sehingga kebijakan anggaran DKI Jakarta diimplementasikan tanpa arah yang jelas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa :

- a. Kinerja keuangan pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2008 – 2012 adalah baik bila dilihat dari kategori rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio aktivitas, serta rasio pertumbuhan. Sedangkan untuk rasio efisiensi tidak baik. Berikut ini adalah kesimpulan dari tiap – tiap rasio :
- 1) Rata – rata rasio kemandirian keuangan daerah DKI Jakarta pada tahun anggaran 2008 – 2012 termasuk dalam pola hubungan partisipatif atau termasuk dalam kategori kemampuan daerah sedang.
 - 2) Rata – rata rasio efektifitas Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tahun anggaran 2008 – 2012 termasuk ke dalam kriteria sangat efektif.
 - 3) Rata – rata rasio efisiensi belanja daerah terhadap pendapatan daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2008 – 2012 tergolong pada kriteria kurang efisien.
 - 4) Dari hasil perhitungan rata – rata rasio aktivitas untuk belanja operasi dan belanja modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2008 – 2012 menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih memprioritaskan belanja operasi dari pada belanja modal.

- 5) Rasio pertumbuhan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2008 - 2012 pada umumnya mengalami kenaikan. Dalam pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah mengalami puncak kenaikan pada tahun anggaran 2010 – 2011, begitu juga pada pertumbuhan pendapatan yang mengalami puncaknya pada tahun anggaran 2011 – 2012. Ini berarti Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan dari tahun ke tahun. Belanja operasi dan belanja modal mengalami puncak kenaikan pada tahun anggaran 2011 – 2012 dan 2008 – 2009.
- b. Hambatan yang terdapat dalam kinerja keuangan daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2008 – 2012 yaitu:
 - 1) Praktik penyimpangan anggaran DKI Jakarta.
 - 2) Lemahnya kontrol *budgeting* DPRD DKI Jakarta.
 - 3) Kuatnya pengaruh politik di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- c. Cara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi hambatan yaitu dengan :
 - 1) Gerakan pengawasan anggaran daerah DKI Jakarta.
 - 2) Memperkuat dan memaksimalkan fungsi *budgeting* DPRD DKI Jakarta.
 - 3) Perbaikan dan penataan kembali manajemen pengelolaan keuangan daerah DKI Jakarta.

Saran

Melihat permasalahan yang ada dan dengan memperhatikan hasil dari analisis terhadap rasio pengelolaan keuangan terhadap APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama tahun anggaran 2008 – 2012 serta kesimpulan yang telah disampaikan di atas, maka saran – saran yang mungkin berguna bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara lain sebagai berikut :

- a. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menggunakan analisis rasio keuangan untuk melakukan penilaian dan evaluasi kinerja untuk kepentingan manajemen birokrasi pemerintah serta untuk menambah kualitas sistem informasi keuangan daerahnya.
- b. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun dan merealisasikan APBD perlu memperhatikan rasio kemandirian dan trend kemandirian, serta rasio efisiensi keuangan daerah.
- c. Di lihat dari hasil perhitungan rasio efektifitas untuk tahun anggaran 2012 yang mengalami penurunan, maka perlu adanya peningkatan pada tahun anggaran 2013.
- d. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu melakukan penghematan terhadap belanja operasi dan melakukan pengalokasian ke belanja modal pada tahun anggaran 2013.
- e. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan agar dapat menjaga kestabilan rasio pertumbuhan yang telah dicapainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra, 2010, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Jakarta: Erlangga.
- Bisma, I Dewa Gde, 2010, Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 – 2007, *Ganec Swara Edisi Khusus*, Vol 4, No. 3
- Darise, Nurlan, 2006, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta: PT Indeks.
- Halim, Abdul, 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi 4, Jakarta : Salemba Empat.
- Halim, Abdul, 2004, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Yogyakarta : UPP UMP YKPN
- <http://nasional.kompas.com/read/2013/05/31/03103382/BPK.Nilai.Laporan.APB.D.Pemprov.DKI.Tahun.2012.Wajar>
- Mahsun, Mohamad. 2006, dalam Suyana, Utama M. 2007. *Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2001 – 2006*. Studi Kasus Pada 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. (tidak dipublikasikan).
- Mahsun, Sulisyowati Firman dan Andre Purwanugraha, Heribertus, 2011. *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi 3, Yogyakarta: BPFEE.
- Mardiasmo, 2007, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi
- Nordiawan, Deddi dan Hertianti, Ayuningtyas, 2010, *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi 2, Jakarta : Salemba Empat.
- Nordiawan, Deddy, Iswahyudi Sondi Putra, dan Maulidah Rahmawati, 2007, *Akuntansi Pemerintah*, Jakarta : Salemba Empat.
- Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2007 tentang pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Permendagri No. 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun Anggaran 2009.
- Permendagri No.21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Prihatiningsih, Ana, 2010, "***Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kota Surakarta***", Surakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Rasidah dan Marsidah, 2009, Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin Periode 2004 – 2008, ***Jurnal Ekonomi Pembangunan, Manajemen, dan Akuntansi***, vol.8, no. 2
- Robertson, Gordon, 2007. ***Review Kinerja***, Loka Karya Review Kinerja: BPKP dan Executive Edition.
- Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang – Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah.
- Yurikhe Junitha dan Powa Heince Wokas, 2012, Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2008 – 2010, ***Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing***, Vol. 3, No. 1
- Yuwono, Sony, Dwi Cahyo Utomo, Suheiry Zein, dan Azrafiany A.R, 2008, ***Memahami APBD dan Permasalahannya : Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah***, Malang: Banyumedia Publishing.